

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Mangalou, (2017) Dalam penelitiannya, konflik dan faksionalisasi elite partai golkar pasca pilpres 2014, mengkaji konflik dualisme kepengurusan partai golkar yang berimplikasi pada kemunculan faksi baru. Fragmentasi antar elite Partai Golkar bisa dilihat dari keberadaan faksi-faksi yang tumbuh subur dalam tubuh Beringin, Pembagian faksi pada pilpres 2014 partai golkar dapat dibagi menjadi dua, faksi Aburizal Bakrie dan faksi Agung Laksono. Berdasarkan permbagian ini berbasis pada dua hal, jaringan pertemanan dan jaringan kepentingan. Jaringan pertemanan yang dianggap solid mengikut pada apapun keputusan dari ketua umum Aburizal Bakrie yang selaku pemegang kekuasaan tertinggi, dalam faksi tersebut terdapat berbagai kelompok-kelompok kecil yang mendukung seperti Idrus Marham, Setya Novanto, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin, Nurdin Halid, dan Bambang Soesatyo.

Sedangkan faksi kepentingan yaitu jaringan yang berdasarkan kepentingan mendukung Jusuf Kalla. Sebagai kapasitas beliau sebagai mantan ketua umum partai dan dianggap memiliki *power* (kekuatan) dan (*influence*) pengaruh di dalam kubu partai golkar. Dalam faksi tersebut terdapat pula kelompok-kelompok kecil yang mendukungnya, seperti Agung Laksono, Agus Gumiwang, Kartasasmita, Poempida Hidayatullah, Nusron Wahid, dan Indra J Pilliang. Dengan demikian, sesungguhnya perselisihan antar faksi di Partai Golkar sangat cair, sebab tidak

terdapat pertentangan ideologis didalamnya. Ideologi Partai Golkar sendiri pun belum terlalu kuat karena dalam perjalanan kepartaiannya bergerak kearah pragmatis. Pergerakan faksi yang sangat dinamis dalam Partai Golkar disebabkan tidak terdapat aktor tunggal yang mengaturnya, sehingga pertarungan antar aktor berjalan sesuai dengan momentum politik yang terjadi. Dalam faksi Partai Golkar, banyak terdapat aktor dominan, yang berkiblat pada figuritas tokoh-tokohnya. Aktor-aktor dominan tersebut seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan lain-lain. Aktor-aktor dominan tersebut banyak mempunyai kader loyalis, dimana akan mengikuti arah gerbong" dari figur yang diikutinya. Pola hubungan tersebut secara teoritis dapat disimpulkan sebagai patron- klien, dan sebagai konsekuensi logis dari pertarungan tersebut terjadi penyingkiran orang- orang tertentu yang tidak sejalan dengan gerbong.

Tabel 2.1
Faksi Munas Bali dan Faksi Munas Ancol

Munas Bali	Idrus Marham, Nurdin Halid, Bambang Soesatyo, Setya Novanto, Ade Komarudin, Ahmadi Noor Supit, Airlangga Hartarto, Theo L Sambuaga, Fadel Muhammad , Sjarif Cicip Sutardjo, Siti Hediati Harijadi, Ridwan Hisyam, Freddy Latumahina, Firman Soebagyo, Tantowi Yahya, Yorrays Raweyai (sebelumnya Ketua DPP di Munas Ancol)
Akbar Tandjung, MS Hidayat	
Aburizal Bakrie	
Munas Ancol	Zainudin Amali , Priyo Budi Santoso, Agun Gunadjar Sudarsa, Agus Gumiwang Kartasmita, Adies Kadir, Gatot Sudjito, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ibnu Munzir, Lawrence TP Siburian, Djasri Marin, Melchias M Mekeng, Leo Nababan, Indra J Piliang, Anwar Adnan Saleh, Ali Wongso Sinaga, Ganjar Razuani, Hamzah Sangaji, Ace Hasan Syadzily, Ridwan Mukti, Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah
Jusuf Kalla, Luhut Binsar Pandjaitan, Siswono Yudhohusodo	
Agung Laksono	

Sumber: Diolah oleh penulis

Romli, (2018) Dalam penelitiannya koalisi dan konflik internal partai politik pada era reformasi, dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan konflik internal dalam partai politik pada era reformasi disebabkan oleh pilihan pada koalisi dalam mendukung calon president dan calon wakil president atau koalisi terhadap pemerintah. Dalam internal partai politik, memberikan dukungan dan bergabung dalam koalisi atau mendukung pemerintah serta partai yang dianggap sebagai oposisi pada pemerintah dapat menimbulkan faksionalisasi dan perpecahan.

Kasus pertama konflik internal partai politik terkait dengan ini adalah PKB, pada era Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur). Seperti diketahui, Gus Dur terpilih menjadi Presiden diusung oleh Koalisi Poros Tengah. Dalam perjalanan kemudian, koalisi Poros Tengah pula yang menggagas untuk “menjatuhkan” Gus Dur dari kursi Presiden. Dalam konteks konflik internal PKB, Matori Abdul Djajil, sebagai ketua umum dewan tanfidz PKB, justru setuju untuk melengserkan Gus Dur sebagai Presiden. Padahal Gus Dur, sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB, membekukan seluruh kegiatan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di DPR dan MPR, dan melarang hadir dalam Sidang Istimewa (SI) MPR. Larangan tersebut dilanggar oleh Matori, karena ia tetap hadir dalam SIMPR tanggal 23 Juli 2001. Matori lalu diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP PKB oleh Gus Dur dan menunjuk Alwi Shihab sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum DPP PKB.

Konflik antara Gus Dur dan Matori berujung pada kepemimpinan ganda: PKB Batu Tulis di bawah kepemimpinan Matori dengan Ketua Dewan Syuro KH. Dimiyati Rois dan PKB Kuningan yang dipimpin oleh Alwi Shihab dengan Ketua

Dewan Syuro Gus Dur. Dalam perkembangan kemudian, setelah dipecat dari keanggotaan PKB, Matori bersama Abdul Kholik Ahmad dan Agus Suflihat membentuk partai sendiri dengan nama Partai Kebangkitan Demokrasi (PEKADE). Sedangkan kubu Gus Dur sendiri dalam Musyawarah Luar Biasa (MLB) memilih Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai Ketua Umum DPP PKB dan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Aminuddin & Ramadlan, (2017) Dalam penelitiannya *Match-All Party: Pragamatisme politik dan munculnya spesies baru partai politik di Indonesia pasca pemilu 2009*. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa masuknya partai politik baru yang tidak memiliki basis massa khususnya terkait pada banyaknya organisasi yang ada. Selanjutnya perolehan kursi dalam dewan perwakilan rakyat (DPR) mengindikasikan bahwa politik aliran yang dipercaya sebagai konsentrasi partai politik dan juga basis politik yang ada di Indonesia telah mengalami sebuah kemunduran. Kemunduran ini dialami juga oleh yang basisnya sentiment terhadap primordial dan ideologi keagamaan. Dalam partai politik hal yang sama juga pada basis massa yang berbasis pada nasionalisme, sosialisme, dan kerakyatan. Tentunya hal tersebut dapat dilihat sangat penting sebagai kontelasi politik yang arah demokratisasinya ditentukan oleh polarisasi lembaga-lembaga politik lainnya.

Terdapat tiga aspek penting yang dapat dicermati dari situasi pemilu 2009 secara umum. Model kepercayaan yang arah dan bentuknya tidak jelas. Pada perkembangannya, tidak ada satu pun partai politik memiliki kecenderungan pada jenis partai politiknya. Hampir semua partai politik di Indonesia saat ini, merupakan partai baru atau setidaknya merupakan “peranakan” dari partai lama

yang mengalami perubahan pada pelembagaan dan karakteristik seiring pada dinamika yang berkembang di pasca reformasi. Sedangkan partai-partai yang sebelumnya telah terbentuk pada era order baru merupakan Golkar dan PPP yang beradaptasi pada perubahan dalam pelembagaan internal maupun eksternal. Sejak tahun 2009 partai-partai baru yang gagal dalam memperoleh kursi tersingkir karena aturan parliamentary threshold. Sebagian dari partai tersebut hanya bertahan hingga pasca pemilu 2014. Sedangkan partai-partai lain ini cenderung mengalami pragmatis yang potensinya sedang berkembang saat itu. Partai-partai inilah yang dikategorikan sebagai *match-all-party*.

Rohman, (2018) Dalam penelitiannya Kristalisasi Faksionalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004, mencoba untuk melacak kembali konseptualisasi faksi dalam studi partai politik. Faksionalisasi adalah fenomena yang sering hadir di tubuh partai politik. Dalam konteks partai di Indonesia, bentuk faksionalisasi terjadi di PKB. Ketika faksionalisasi semakin tajam dalam PKB tidak dapat dikelola dengan baik, maka ada bola liar yang menyebabkan pembentukan PKNU. Kelahiran PKNU ini merupakan bentuk nyata dari faksionalisasi yang terjadi di PKB. Kelahiran PKNU adalah bukti bahwa faksionalisasi di tubuh PKB tidak dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik. Ini merupakan indikasi bahwa organisasi partai politik tidak adaptif terhadap pandangan yang berbeda dan garis politik di PKB.

Faksionalisme partai politik yang diakhiri dengan munculnya partai baru merupakan hasil akhir dari proses kristalisasi faksionalisme partai. Kristalisasi faksi bermula dari adanya konflik kepentingan antar elite partai sehingga muncul

faksionalisme partai. Setelah faksi-faksi partai pada tahap fragmentasi sehingga mengkonsolidasikan diri sebagai faksi yang solid maka akan masuk pada tahap institusionalisasi faksi. Pada tahap ini faksi benar-benar telah terlembagakan dengan berbagai perangkat struktur keanggotaan didalamnya. Ketika faksi sudah terlembagakan pada tahap institusionalisasi partai, maka akan masuk pada tahap terakhir, yaitu polarisasi faksi dimana mulai ada pembelahan faksi sehingga muncul partai politik baru.

Deskripsi tentang kristalisasi faksionalisme partai yang ada pada kasus PKB sehingga lahir PKNU dapat dijadikan sebagai cara untuk melihat bagaimana dinamika internal partai politik sehingga muncul partai baru. Apa yang diperankan oleh faksi Gus Dur menunjukkan corak faksi di Indonesia masih sangat personal. Pertukaran sumber daya antar aktor partai menjadi basis munculnya faksi personal di Indonesia. Munculnya faksi personal di Indonesia juga tidak lepas dari faktor ketokohan didalam partai politik sehingga patronase politik sangat kuat didalam partai politik. Ketika muncul tekanan faktor eksternal seperti kepentingan Pilpres, maka kemunculan faksi tidak bisa terhindarkan. Dengan demikian, faktor konflik kepentingan antar tokoh partai menjadi landasan bagi kemunculan faksi-faksi yang selanjutnya tumbuh partai-partai baru di Indonesia.

Nurhasim, (2013) Dalam penelitiannya Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi, pertumbuhan partai politik pada era reformasi mengarah pada partai yang tidak memiliki basis (*class-based parties*). Partai yang cenderung lebih mirip sebagai *catch all party*. Masuknya unsur-unsur tradisional juga menyebabkan personalisasi yang kuat sehingga menyebabkan struktru

kelembagaan partai hampir tidak berfungsi. Hal tersebut juga dijadikan sebagai strategi dalam meraup suara yang dalam kenyataannya lebih banyak mendapat meudharatnya dibanding mendapatkan manfaatnya.

Pendirian partai politik sebenarnya memiliki faktor yang berbeda-beda. Era penjajahan pendirian partai dimaksudkan sebagai alat para pejuang dalam melawan penjajah. Sementara itu pada masa awal kemerdekaan setelah maklumat 7 november 1945 sudah mulai banyak partai politik seperti NU, PKI, PNI dan Masyumi. Pendirian partai politik selain didorong oleh adanya peluang dalam mendirikan partai, juga disebabkan oleh faktor kepentingan aliran.

Peluang tersebut membuat tumbuhnya partai-partai baru pada era reformasi. Pemilu 1999 pertama kali dilakukan pada era reformasi, tercatat 141 partai sebagai organisasi yang memiliki badan hukum dan tercatat di departemen kehakiman dan HAM. 141 partai politik tersebut berioentasi pada basis pendirian partai yang beragam utamanya pada politik keagamaan. Ada yang berdiri berdasarkan mewakili gender seperti partai perhimpunan Indosnesia. Ada juga yang berdiri berdasarkan mewakili etnis tioghoa yakni partai tionghoa Indonesia (Parti). Dan ada pula merupakan semparan dari golkar seperti MKGR. Lalu ada juga yang mengusung idiom-idiom partai masyumi seperti partai bulan bintang (PBB).

Dalam kalangan umat islam juga menghendaki didirikannya sebuah partai islam sebagai wadah dalam menampung aspirasi umat. Beberaoa aktivis islam yang terlibat didalamnya akhirnya mendirikan partai umat islam (PUI). Kemudian dalam kalangan islam tradisionalis, dengan dipelopori oleh nahdlatul ulama (NU) berdirinya partai kebangkitan bangsa (PKB). Demikian pula yang mengantarkan

berdirinya partai islam lainnya seperti partai keadilan sejahtera (PKS), partai damai sejahtera (PDS), partai bintang reformasi (PBR) dan partai bulan bintang (PBB). Setelah melakukan verifikasi melalui badan hukum, 48 partai dinyatakan lolos sebagai partai yang dapat mengikut pemilu. Dalam hasil pemilu tahun 1999 mencatat dari 48 partai sebagai peserta pemilu hanya ada 21 partai yang berhasil lolos mendudukkan calonnya sebagai anggota DPR diantaranya Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PBB, PNU, PDKB, PKP, PDR, PDI, PSII, PNI. PBI, PKU, IPKI, Masyumi, Partai keadilan, dan PKD. Sisanya partai politik yang tidak memperoleh suara yang signifikan dalam mendulang kursi DPR.

Tabel 2.2
Perbandingan Peserta Pemilu 1999, 2004, dan 2009

Pemilu 1999 44 Partai Peserta Pemilu	Pemilu 2004 24 Partai Peserta Pemilu		Pemilu 2009 38 Partai Peserta Pemilu	
Partai	Partai Lama	Partai Baru Berdiri	Partai Lama	Partai Baru Berdiri
PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB, Partai Keadilan, PKP, PNU, PDKB, PBI, PDI, PP, PDR, PSII, PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaen, IPKI, PKU, Masyumi, dan PKD, Partai Keadilan, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, dan PARI.	PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB, PNI Marhaenisme, PBB, PIB, PNBK, Partai Pelopor	Partai Demokrat, PKS, PKPI, PPNUI, PDS, PBSO, Partai Merdeka, PBR, PSI, PKPB, PBK, Partai Patriot Pancasila, PPD,	PKPB, PKPI, PD, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PIB, PPP, PKB, PNI Marhaenisme, PKP, PPDI, PDK, Partai Pelopor, PDS, PBB, PBR, PP, Partai Merdeka, PSI, Partai Buruh	Gerindra, Hanura, PPRN, Barnas, RepublikaN, PKDI, PKNU, PPNU, PIS, PMB, Partai Kedaulatan

Sumber: Diolah oleh penulis

Budiatri et al., (2017), Dalam penelitiannya yang berjudul Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi. Persoalan politik yang dialami hampir semua partai politik bermula dari konflik internal. Dalam era

reformasi semua partai berkuasa di parlemen. Mengenai konflik partai dan cara pencegahaannya sudah diatur dalam undang-undang partai politik namun konflik internal dalam partai tetap tidak dapat terhindarkan. Dalam riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang memicu terjadi penyebab konflik diantaranya terkait ideologi, kepemimpinan partai yang dianggap personal dan oligarki, serta koalisi partai yang cair. Kemudian kombinasi sistem yang proporsional terbuka, adanya infektivitas aturan hukum formal, sistem multipartai ekstrim dan sistem pemilu langsung mempengaruhi konflik internal dalam partai politik. Konflik pada dasarnya merupakan dampak yang buruk bagi partai sebab dapat mengganggu rekrutmen partai serta dapat mengganggu kinerja para elektornya. Oleh sebab itu upaya yang terus dilakukan dalam mengatasi dan mencegah konflik dalam sebuah partai politik merupakan suatu kepatutan.

Perpecahan dalam tubuh partai di Indonesia sudah mulai terjadi sejak sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Fenomena perpecahan partai yang terekam kuat dalam sejarah kepartaian Indonesia adalah ketika Partai Sarekat Islam Indonesia (PDII) terbelah menjadi dua faksi yakni: faksi non komunis yang kemudian disebut sebagai Sarekat Islam (SI) Putih, dan faksi komunis yang kemudian dikenal dengan SI Merah. Konflik dan perpecahan partai ini pun membelenggu beberapa partai lainnya setelah kemerdekaan Indonesia (catatan: pada saat demokrasi parlementer berlangsung), termasuk Partai Masyumi yang cukup besar pada saat itu. Meskipun demikian, pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno terbentuknya konflik dan perpecahan partai sempat mereda karena Pemerintahan pada saat itu membatasi jumlah partai politik, sehingga penting bagi

partai untuk memperkuat kohesi dan soliditas partai.³ Namun perpecahan kembali meradang ketika Orde Baru berlangsung dikarenakan pemerintah saat itu menyederhanakan jumlah partai menjadi tiga saja dan menggabungkan secara paksa berbagai partai ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Meskipun aturan hukum formal telah disusun untuk mencegah terjadinya konflik internal dan pembelahan partai politik, namun partai politik pada era reformasi ini tidak lantas lepas dari persoalan konflik tersebut. Sebaliknya, hal yang terjadi justru angka konflik dan perpecahan partai sejak 1999 hingga saat ini sangatlah tinggi. Hampir seluruh partai besar mengalami persoalan konflik dan perpecahan, termasuk, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berikut di dalam tabel 2 memperlihatkan partai politik apa saja yang mengalami konflik internal dan perpecahan pada era reformasi.

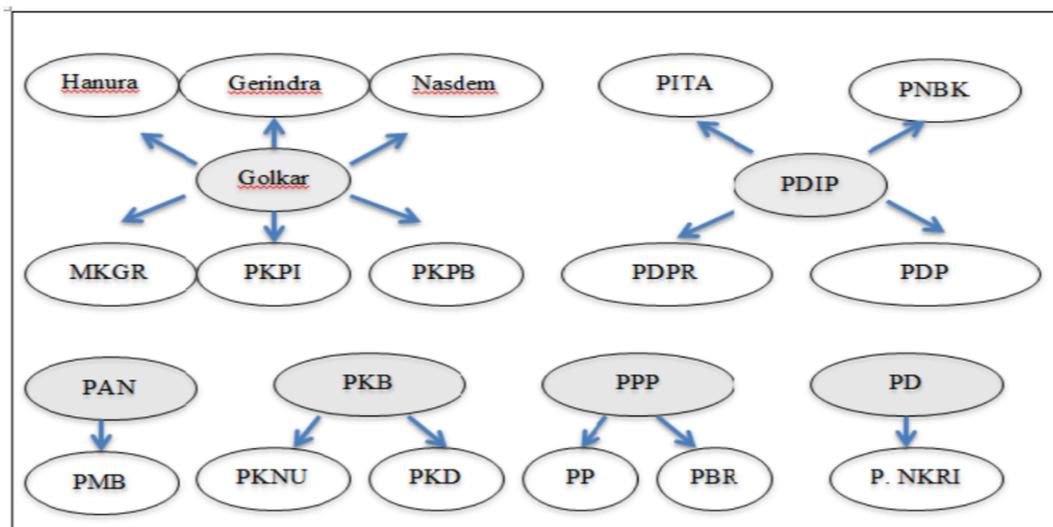
Tabel 2.3
Konflik dan Perpecahan Partai Politik pada Era Reformasi

Tahun Kasus	Partai yang Mengalami Konflik Internal dan Perpecahan Partai
2001	PDIP
2002	PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP
2004	Partai Golkar
2005	PDIP, PKB, Partai Demokrat, PPP
2006	PAN
2008	PKB
2012	Partai Golkar
2013	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2014	Partai Golkar, PPP, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2016	PKS

Sumber: diolah dari berbagai sumber media

Kasus konflik dan perpecahan partai yang berlangsung selama era reformasi ini terjadi karena berbagai latar belakang, mulai dari perbedaan pandangan pada visi-misi partai, perpecahan dukungan pencalonan dalam pemilu presiden, tidak terakomodasinya usulan di dalam partai, serta perbedaan pemberian dukungan terhadap calon pimpinan partai di dalam suksesi internal partai. Persoalan konflik tidak hanya menerpa partai- partai yang terbilang baru terbentuk seperti Partai Nasdem, Gerindra dan Hanura saja, namun juga partai-partai yang sudah berdiri sejak awal bahkan sebelum era reformasi seperti PDIP, Partai Golkar, PAN, dan PKB. Hal yang menarik, partai yang kemudian mengalami konflik juga merupakan partai hasil pecahan akibat konflik, seperti Partai Nasdem, Gerindra dan Hanura yang sesungguhnya hasil pembelahan Partai Golkar. Tidak hanya Golkar yang mengalami konflik lalu terpecah menjadi beberapa partai baru, beberapa partai juga mengalami hal yang sama.

Gambar 2.1 Partai Baru Hasil Perpecahan Partai Politik



Sumber: diolah oleh penulis

Warijo, (2017) Di dalam penelitiannya Falsafah dan strategi politik dakwah PKS menjelaskan platform kebijakan pembangunan PKS (2008) telah pun disebutkan bahwa dalam mengisi reformasi di Indonesia. Di dalam individu-individu tersebut bebas dari sikap menzalimi dari diri sendiri. Nilai-nilai keimanan dan kebaikan serta saling menghormati berkumpul dalam suatu lingkungan yang sebagai masyarakat yang berbangsa. Antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi sehingga terwujud manusia yang amanah. Secara seimbang hak-hak masyarakat terbangun dalam kesamaan sosial dan kehidupan yang tenteram menuju terbentuknya masyarakat yang dinamis

Dalam tatanan harapan hidup manusia Indonesia PKS memiliki kekuasaan yang demokratis, berjalan dalam aturan hukum dan agama yang berlaku, serta lebih mengepankan hak-hak masyarakat dalam memperoleh hak politiknya secara penuh. Dalam PKS juga terdapat mekanisme hukum yang berkeadilan dimana semua orang punya persamaan hak. Kebersamaan membangun sebuah ekosistem berusaha diubah sebagai cermin dari sebuah ekonomi yang berkeadilan. Bagi PKS, itulah masyarakat yang religi, masyarakat madani, yang seluruh bahagiannya bekerja sama dalam kebaikan, tolong menolong dalam menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan.

Masyarakat yang adil dan makmur, yang melindungi warganya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang hidup berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya takwa. Indonesia yang diharapkan adalah keadaan masyarakat yang hidup

penuh dengan kasih sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, laki-laki bahu mem- bahu dengan perempuan, dalam perbezaan kebudayaan. Oleh yang demikian PKS kukuh dalam prinsip tetapi, bertolak ansur dalam amali. Semua itu adalah keadaan yang PKS impikan sekaligus keadaan kehidupan berdakwah yang diharapkan. Berpuncak pada terjaminnya manusia dalam memenuhi lima keperluan primer hidupnya, yaitu perlindungan atas agama, jiwa akal, harta dan keturunan.

Penegasan PKS sebagai partai dakwah telah dituangkan melalui perlembagaannya. Di dalam perlembagaan PKS, terutamanya di dalam wawasannya disebutkan bahwa PKS sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Bagi PKS, dakwah Islam pada hakikatnya merupakan aktivitas terencana untuk mengubah individu dan masyarakat dari kehidupan jahiliah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses mengubah individu iaitu pem- bentukan peribadi-peribadi Muslim sejati (syakhsiyyah Islamiyah) dilakukan dalam kerangka transformasi sosial. Sebab terbentuknya peribadi Muslim sejati bukanlah tujuan akhir. Oleh kerana itu peribadi-peri- badi ini mesti memperkaya kualiti dirinya untuk menjalankan amanah dakwah (syakh- siyyah da'iyyah), hingga mampu berperanan aktif dalam melakukan transformasi sosial.

Ricciuti, (2004), Dalam penelitiannya *Political fragmentation and fiscal outcomes*, fragmentasi politik mungkin timbul dari beberapa aspek dari proses penganggaran dan kekuatan yang menghadang di atasnya. Biasanya mengacu pada koalisi yang mendukung pemerintah, baik dari segi ukuran dan bentuk dan

koherensi ideologi internal. Ini mungkin merujuk kepada parlemen secara keseluruhan, pemerintah dan oposisi. Hal ini juga berkepentingan pemerintah sendiri, apakah salah satu menteri (yaitu Menteri Keuangan yang memiliki kekuatan untuk mengatur ukuran keseluruhan anggaran dan komposisi antara pengeluaran dan pendapatan dan kemudian tawar-menawar dengan para menteri lain untuk mengatur anggaran mereka sendiri dalam terang kompatibilitas dengan set tujuan umum. Dalam situasi lain Menteri Keuangan mungkin memiliki kemampuan yang rendah untuk menetapkan target keseluruhan: proses penganggaran menjadi koleksi beberapa proposal diri tertarik oleh menteri tunggal yang terutama tertarik dalam meningkatkan posisi mereka sendiri.

Salihah, Rahmatunnisa, & Witianti, (2018) Dalam penelitiannya Fenomena Fragmentasi Partai Politik Versus Penerapan Parliamentary Threshold Indonesia. fenomena fragmentasi partai politik adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada masa reformasi yang dimana sejumlah partai politik pasca runtuhnya orde baru menggunakan sistem multipartai. Di masa reformasi, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, polemik tentang penyederhanaan partai politik mencuat ke permukaan. Terakhir, yang menjadi materi perdebatan adalah soal ketentuan parliamentary threshold, dimana pada masa reformasi pada pemilu 1999 dan 2004 terjadi lonjakan jumlah partai politik yang ikut serta dalam pemilu legislatif, sehingga dirasakan kurang efektif dan efisien dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pada waktu itu, sebanyak 11 partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Politik ini menilai ketentuan parliamentary threshold berpotensi

membatasi hak politik warga negara. Namun, MK menolak judicial review ketentuan itu.

Berdasarkan hal tersebut, Pada tahun 2009 sistem pemilu kita membuat aturan ambang batas parlemen. Aturan tersebut mengatur adanya batas minimal parliamentary threshold untuk mencegah kelompok-kelompok kecil dan radikal di parlemen. Hal ini dianggap baik karena akan menyederhanakan parlemen, serta membantu terbentuknya pemerintahan dan parlemen yang stabil. Namun para pengkritik sistem ini berpendapat bahwa sistem ini cenderung meniadakan wakil rakyat untuk para pendukung partai kecil terlepas dari perdebatan yang ada selama dua pemilu terakhir partai-partai baru tetap bermunculan.

Implikasi dalam electoral threshold yaitu hanya partai-partai yang memperoleh suara yang memenuhi atau cukup untuk dapat bisa mengikuti proses politik secara formal karena dianggap memiliki kursi dalam parlemen. Oleh sebab itu penerapan electoral threshold sangat berimplikasi pada peningkatan tingkat disproportionalitas dalam suatu sistem perwakilan. Saat aturan ini diterapkan, banyak suara yang terbuang atau tidak terhitung. Dalam threshold, apabila dilihat dari segi jumlah partai politik, sistem kepartaian yang dimiliki oleh suatu negara bisa jadi terkategori multipartai penuh, misalnya memiliki lebih dari 10 (sepuluh) partai politik. Namun, sistem kepartaian riil yang ada di pemerintahan bisa berbeda karena yang memperoleh kursi di parlemen tidak sebanyak partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, secara riil negara-negara yang menerapkan threshold telah mendorong terwujudnya sistem multipartai sederhana atau moderat di dalam pemerintahannya.

Zalpha, (2016) dalam penelitiannya Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014, Penelitian ini mengkaji tentang konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar tahun 2014. Konflik yang bermula pada kekuasaan pada totaliterisme yang mengarkan Golkar bersama kekuasaan pemerintah meghadirkan kekecewaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu pada 9-11 juli 1998 Golkar melaksanakan muasyawah nasional luar biasa (munaslub) yang diselenggarakan dalam usaha untuk membenahi kelembagaan Golkar yang kemudian diberi nama Partai Golkar. Dalam munaslub tersebut, akbar tanjung terpilih sebagai ketua umum (ketum) partai Golkar. Hal ini membuat eksistensi Golkar tetap berlanjut meskipun terdapat beberapa perubahan dasar pada visi dan misi yakni terbuka, mandiri, moderat, mengakar, demokratis, dan responsive. Jika dikaji lebih lanjut makan dari segi tipologi kelembagaann ataupun analisis konflik yang terjadi pada partai golkar, maka hal tersebut mencerminkan pragmatisme dalam partai politik di Indonesia.

Tabel 2.4
Ringkasan Studi Pustaka Terdahulu

Pengelompokan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<i>Konflik Internal Partai Politik</i>	Romli. L (2018), Budiatri et al., (2017), Zalpha (2016) Faktor yang menyebabkan konflik internal di dalam partai-partai politik pada era reformasi disebabkan oleh pilihan koalisi dari partai-partai politik dalam mendukung calon persiden dan/atau pemerintahan. Di internal partai-partai politik, ternyata dalam memberikan dukungan atau bergabung dalam koalisi dan/atau mendukung pemerintah atau berposisi tersebut, memunculkan perpecahan dan faksionalisme. penyebab konflik

	terkait ideologi, kepemimpinan partai yang dianggap personal dan oligarki, serta koalisi partai yang cair
<i>Faksionalisasi Partai Politik</i>	Manggalou (2017), Rohman, (2018) Warijo (2017) Aminuddin & Ramadlan (2017) Dalam penelitiannya, terjadi dualisme pada kepengurusan partai golkar pasca pilpres 2014, Fragmentasi antar elite Partai Golkar bisa dilihat dari keberadaan faksi-faksi. Faksi Aburizal Bakrie dan faksi Agung Laksono. Berdasarkan permbagian ini berbasis pada dua hal, jaringan pertemanan dan jaringan kepentingan. Jaringan pertemanan yang dianggap solid mengikut pada apapun keputusan dari ketua umum Aburizal Bakrie. Sedangkan faksi kepentingan yaitu jaringan yang berdasarkan kepentingan mendukung Jusuf Kalla. Begitupun yang terjadi pada PKB, Ketika faksionalisasi semakin tajam dalam PKB tidak dapat dikelola dengan baik, maka ada bola liar yang menyebabkan pembentukan PKNU.
<i>Fregmentasi Partai Politik</i>	Salihah, Rahmatunnisa, & Witianti (2018), Nurhasim, (2013), Ricciuti (2004), fenomena fragmentasi partai politik adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada masa reformasi yang dimana jumlah partai politik pasca pemerintah orde baru runtuh jika dibanding pada jumlah partai di tahun 1950an. Sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, polemik tentang penyederhanaan partai politik mencuat ke permukaan.

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat mengenai penelitian terdahulu sebagai gambaran dalam penelitian ini. Setidaknya tiga kategori artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini yaitu konflik internal partai politik, faksionalisasi partai politik, dan fregmentasi partai politik, yang dari ketiganya mayoritas konflik dan fregmentasi partai. Penelitian ini akan membahas kelahiran Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), yang memungkinkan terjadi konflik internal dalam partai keadilan sejahtera (PKS) sehingga beberapa tokoh diantaranya membentuk sebuah gerakan sosial yang dinamainya gerakan arah baru Indonesia (GARBI). Selanjutnya penelitian ini akan membahas terkait motif politik yang menandai pembentukan gerakan tersebut serta gerakan sosial yang dilakukannya dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia dan dengan berbagai spekulasi yang muncul, GARBI akan menjadi partai politik di tahun 2024.

2.2 Kerangka Teori

Berdasarkan topik penelitian ini, terdapat dua jenis kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah teori tentang motif politik. Kedua adalah teori gerakan sosial. Kerangka teori akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Motif Politik

Motif adalah asal kata dari motivasi, yang dikenal sebagai *Motive* yang berarti dorongan. Motif diartikan sebagai dorongan maupun kekuatan yang terdapat dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan (*driving force*). Pada dasarnya motivasi berasal dari motif yang merupakan pengertian yang melingkupi penggerak, baik alasan-alasan maupun dorongan dalam diri manusia. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor

eksternal, maupun faktor internal. Dalam kajian psikologi, motif dimaknai sebagai alasan seseorang yang mendasarinya untuk melakukan sesuatu. Motif sendiri bukanlah sesuatu hal yang tampak melainkan tersembunyi. Motif dapat diketahui melalui pengakuan seseorang dengan alasan tertentu melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. McClelland, (dalam Hamzam B Uno, 2013:9)

Untuk mendapatkan kekuasaan dalam dunia politik yaitu sebagai tujuan yang dikehendaki oleh semua aktor politik. Kekuasaan bukan kendaraan untuk menjadi alat gagah-gagahan atau menunjukkan keperkasaan, melainkan suatu amanah dan wadah dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Para penguasa hakikatnya adalah manajer yang mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang berdampak baik maupun buruk bagi masyarakat. Motif politik bukanlah suatu hal yang asing dalam dunia perpolitikan di dunia, termasuk di Indonesia. Motif politik tidak lepas dari aktor-aktor politik yang memerankannya. Motif politik berkaitan dengan kepentingan politik individu, seperti kepentingan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, kepentingan untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat yang lebih baik, atau bahkan kepentingan untuk memperoleh dukungan masyarakat, kepentingan untuk mendapatkan simpati publik, dan juga kepentingan untuk kekuasaan.

McClelland, (dalam Hamzam B Uno, 2013:9) berpendapat motif merupakan implikasi pada hasil pertimbangan yang telah dipelajari (*reintegration*) dengan ditandai suatu perubahan pada situasi afektif. Sumber utama munculnya motif adalah sebuah rangsangan perbedaan situasi sekarang dan situasi yang diharapkan, sehingga tanda perubahan tampak pada adanya perbedaan afektif saat

munculnya motif dan saat usaha pencapaian yang diharapkan. Menurut Atkinson (1958) motif diyakini sebagai suatu disposisi laten yang unuk mencapai tujuannya diperlukan usaha dan kekuatan. Tujuan ini akan berupa prestasi maupun kekuasaan. Sedangkan Walgito, Bimo (2010) memaknai motif sebagai kekuatan maupun dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai segala bentuk tujuan yang ingin dicapainya. Kemudaian dalam peranan aktor politik juga terdapat motif politik. Motif politik menurut Beck & Sorauf (1992:115-126) terdiri dari tiga motif diantaranya :

1. Motif Insentif Material (*Material Incentives*)

- a. Seseorang berpartisipasi politik untuk mencari perlindungan. Perlindungan yang dimaksud disini lebih pada mendapatkan keuntungan pada kepentingan individu atau mendapatkan imbalan yang setimpal dari apa yang dilakukan.
- b. Untuk menjadi pejabat yang dipilih (*elected office*), merupakan cara agar lebih mendekati diri dengan aktor pemerintah agar dapat dengan mudah melanggengkan kekuasaan.
- c. Untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi (*preferment*). Menjadi pejabat public memiliki status sosial yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan penghargaan dan pengakuan untuk meningkatkan derajatnya dimata masyarakat.

2. Motif Insentif Solidaritas (*Solidarity/Sosial Incentives*)

Motif ini untuk mencari kehidupan sosial baru dari yang selama ini mereka miliki. Mendapatkan status sosial yang tinggi inilah yang akan membuat status pejabat public menjadi impian untuk mendapatkan jaringan yang baru.

Menjadikannya sesuatu kekuatan untuk mencapai tujuan bersama dengan menghadirkan rasa simpati dan perasaan emosional serta moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok. Dalam mengidentifikasi motif insentif solidaritas menimbulkan kesulitan disebabkan bersifat non materi hanya bisa dirasakan.

3. Motif Insentif Idealisme (*Purposive/Issued Based Incentives*)

Motif ini yakni keinginan untuk memperjuangkan sesuatu yang bersifat ideal. Memperjuangkan kepentingan rakyat lebih utama ketimbang kepentingan pribadi. Sebagai aktivis partai harus memiliki kemampuan manajemen strategis meliputi kemampuan menerjemahkan ideologi visi, misi, platform parpol ke dalam program kerja yang kemudian dapat menarik minat calon pemilih mereka lantaran dianggap mewakili dan identic dengan kepentingan rakyat.

2.2.2 Gerakan Sosial

Gerakan sosial didefinisikan sebagai tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, kelompok gerakan sosial berakar pada proses memberikan tekanan khusus pada isu-isu yang sifatnya komunalitas, gerakan ini muncul biasanya diakibatkan terjadinya suatu “kekecewaan” yang bermetamorfosis menjadi mobilisasi. Terdapat tiga konsep dalam teori gerakan sosial yang perannya sangat penting dalam aksi-aksi kolektif. Ketiga konsep ini meliputi struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*), struktur mobilisasi (*mobilizing structures*), dan pbingkain aksi (*framing*). Konsep dalam struktur kesempatan politik menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul akibat

dipicu oleh perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi dalam struktur politik dan pergeseran-pergeseran yang terjadi didalamnya. Hasan, (2013)

Dalam teori *dynamic of contention*. Mc Adam, Tarrow dan Tilly (2001) memberikan tiga komponen dalam menganalisis teori ini. Komponen – komponen tersebut yaitu:

1. Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*)

Situmorang (2007) menganalisis gerakan sosial dengan mempergunakan *political opportunity structure* (POS) atau struktur kesempatan politik yang dalam penjelasannya gerakan sosial terjadi akibat disebabkan oleh perubahan pada struktur politik. Mekanisme POS secara spesifik menambahkan variabel lain selain yang dikemukakan Eisinger, yakni akses kepada lembag politik mengalami keterbukaan sehingga muncul tingkat akses pada lembaga-lembaga politik yang memantik munculnya gerakan sosial. kemudian keseimbangan politik yang dirasa sedang mengalami caruk maruk sedangkan keseimbangan politik yang lainnya belum terbentuk. Selanjutnya dijelaskan bahwa gerakan sosial muncul akibat para elit politik mengalami konflik baik konflik internal maupun konflik besar dan konflik ini digunakan oleh para aktor gerakan sebagai kesempatan dalam melakukan perubahan.

2. Struktur Mobilisasi (*mobilizing structures*)

McCharty mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi merupakan aktor-aktor gerakan sosial melebur menjadi aksi-aksi kolektif, baik berupa taktif gerakan maupun bentuk organisasi sosial untuk melakukan perubahan. Situmorang (2007:7). Berdasarkan pendapat tersebut struktur mobilisasi dapat berupa gerakan yang melebur menjadi satu dalam rangka menjalankan taktik dan bentuk gerakan apa

yang ingin dilakukan oleh para pelaku gerakan sosial, McAdam, McCharty dan Zald mendefinisikan bahwa struktur mobilisasi merupakan kendaraan kolektif yang digunakan para pelaku gerakan baik berupa formal maupun informal. Situmorang (2007:7). Kendaraan kolektif disini maksudnya yaitu suatu penghubung para pelaku gerakan dalam menjalankan setiap aksi-aksi kolektifnya.

Namun mobilisasi gerakan sosial cenderung sulit jika dalam gerakan tersebut tidak terdapat penyokong maupun pendorong bagi mobilisasi gerakan tersebut. Penyokong yang dimaksud baik berupa sumber daya dan materi sebab dalam memastikan kekuatan suatu gerakan tergantung pada ketersediaan sumber yang dimilikinya dan tergantung pada keuntungan konkret. Selain itu sumber daya non material juga sangat dibutuhkan dalam sebuah mobilisasi baik berupa jaringan, persahabatan, dan kepercayaan. Didalamnya pun mesti ikut serta dukungan partisipan, publikasi media dan opini-opini public maupun elit yang terdapat dalam aksi kolektif tersebut. Porta dan Diani (2006)

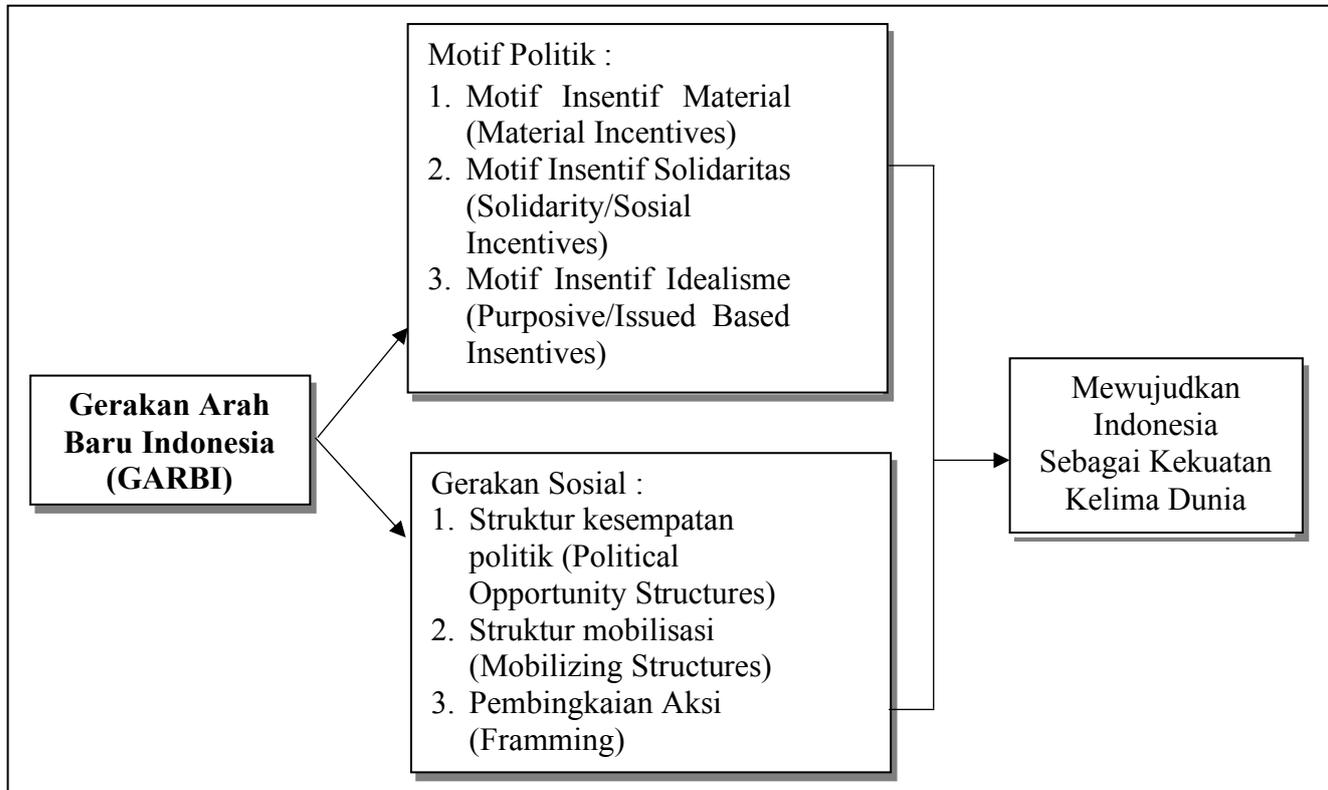
Dalam sistem politik, keterbukaan menjadikan hal yang ikut serta memberikan lemahnya pelembagaan partai politik. Kelonggaran yang diberikan bagi syarat pembentukan partai politik juga memberikan dampak lemahnya pelembagaan dalam partai politik. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menentukan bahwa partai politik dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia dengan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan dibuktikan oleh akta notaris. Ketentuan ini sangat terbuka dan mudah bagi siapa saja yang ingin mendirikan partai politik.

3. Pembingkai Aksi (*Framing*)

Pembingkai Aksi (*Framing*) berasal dari kata *frame* yang berarti pembingkai. Dalam suatu gerakan sosial *framing* merupakan salah item yang terpenting dalam melakukan penyebaran pandangan dan apa yang menjadi cita-cita gerakannya kepada orang lain atau masyarakat. Pembingkai ini pada prosesnya lebih pada menekankan peranan maupun usaha dalam mengusasi ide dan identitas dalam membentuk suatu gerakan sosial. Snow dan Banford mengatakan bahwa gerakan sosial akan berhasil dapat diukur dengan sejauh mana kelompok tersebut memenangkan pertempuran atas apa yang menjadi dirinya kepada masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

2.4 Definisi Konseptional

Definisi konseptual adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang sedang diteliti. Tujuan dari definisi konseptual dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, yaitu :

1. Motif adalah Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, dengan demikian, motif merupakan suatu *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, dan didalam perbuatannya itu terdapat tujuan.
2. Politik adalah seni dalam meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional yang ditempuh setiap warga negara. Disamping itu politik ialah usaha untuk penyelenggaraan pemerintah dan negara, yang kemudian diarahkan pada kegiatan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
3. Gerakan Sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional yang dikemukakan oleh Walizer & Wienir dalam Ritonga (2005: 26) adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur variabel atau konsep definisis operasional tersebut membantu kita untuk mengklasifikasikan gejala di sekitar ke dalam

kategori khusus dari variable. Dalam penelitian ini akan dilakukan sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah.:

Tabel 2.5
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Indikator	Parameter
Motif Politik	Motif Insentif Material	Berkenaan dengan neningkatan kapasitas diri agar dapat melanggengkan kekuasaan utamanya dalam memperoleh kedudukan yang lebih tinggi.
	Motif Insentif Solidaritas	Berkenaan dengan kehidupan sosial baru untuk mendapatkan jaringan yang baru. Perasaan emosional serta moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok
	Motif Insentif Idealisme	Berkenaan dengan keinginan dalam memperjuangkan sesuatu yang bersifat ideal yang sifatnya kolektif. Memperjuangkan kepentingan orang banyak lebih utama ketimbang kepentingan pribadi.
Gerakan Sosial	Struktur kesempatan politik	Berkenaan dengan perubahan dalam struktur politik, yang dilihat sebagai kesempatan untuk membentuk suatu organisasi.
	Struktur Mobilisasi	Berkenaan dengan sikap kolektif maupun langkah dan bentuk apa yang ingi dilakukan dalam gerakan. Tahapa apa yang akan dilakukan oleh para pelaku gerakan untuk membentuk sebuah organisasi.
	Pembingkaian Aksi	Berkenaan dengan pembingkaian yang lebih menekankan pada peranan atau usaha dalam menguasai identitas baru sehingga gerakan yang dibentuk dapat langsung diketahui oleh masyarakat.

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2019